

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun Anggaran 2021 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis Tahun 2019-2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2021.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur Renstra dan Renja SKPD mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya, untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program / kegiatan / kebijakan pada tahun berjalan.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dimasa mendatang.

Raba – Bima, Maret 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bima,

Syarief Rustaman, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730409 199211 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.5 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018- 2023.....	12
2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.....	19
3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif-Solusi yang Telah dan Akan dilakukan.....	40
3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
3.4 Analisis Program atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	44
3.5 Realisasi Anggaran.....	50

BAB IV	PENUTUP.....	54
4.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	54
4.2	Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai DLH Kota Bima Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan/Ruang.....	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai DLH Kota Bima Menurut Tingkat Pendidikan.....	7
Tabel 1.3	Kondisi Pegawai DLH Kota Bima Berdasarkan Jabatan Struktural, Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	8
Tabel 1.4	Jumlah Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup 2021.....	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
Tabel 2.2	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2021.....	15
Tabel 2.4	Program dan Rencana Anggaran Tahun 2021.....	15
Tabel 3.1	Pencapaian Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.....	21
Tabel 3.2	Kategori IKLH.....	21
Tabel 3.3	Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.....	22
Tabel 3.4	Pencapaian Program dan Kegiatan.....	23
Tabel 3.5	Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.....	28
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 2020 dan 2021.....	31
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2020 dan 2021.....	32

Tabel 3.8 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Bima (musim kemarau dan musim penghujan).....	33
Tabel 3.9 Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air.....	33
Tabel 3.10 Formulasi Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air.....	35
Tabel 3.11 Rekap Luas RTH di Kota Bima Tahun.....	35
Tabel 3.12 Pencapaian Target Program dan Kegiatan DLH Kota Bima Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	36
Tabel 3.13 Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2020 dan 2021.....	38
Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2021.....	40
Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Kinerja Keuangan OPD.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi suatu pemerintah sebagai prasyarat untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, hal ini perlu setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan mengatur sumber daya yang ada dengan berpedoman pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dalam bentuk pelaporan kinerja.

Penyusunan pelaporan kinerja merupakan amanat dari peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pejabat Eselon II yang menangani lingkungan hidup Pemerintah Kota Bima diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan sebagai instruksi dari Gubernur .

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, yang disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Periode Tahun 2020 – 2023. Dokumen LAKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP

Maksud dan tujuan disusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah:

A. Maksud

1. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan terhadap penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang berpedoman pada tertib administrasi, tertib pengelolaan keuangan, tertib sasaran fisik dan fungsional.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi apakah pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan tahunan yang dilaksanakan telah sesuai visi, misi, tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

B. Tujuan

Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah di capai, juga sebagai bahan pertimbangan dan atau acuan penyempurnaan kebijakan dan strategi indikaotor sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun berikutnya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (good governance) dan tetap mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima tahun 2021.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.4.1. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima mempunyai struktur organisasi sesuai dengan Surat Keputusan WaliKota Bima Nomor 14 Tahun 2009 adalah Susunan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian.

- c. Bidang Tata Lingkungan, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :
 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3), yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Persampahan;
 2. Seksi Pelayanan Persampahan dan Limbah B3;
 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

- f. Bidang Pertamanan dan Pertamanan, yang dipimpin oleh seorang kepalabidang dan terdiri dari :
 1. Seksi Pemeliharaan Operasional Pertamanan;
 2. Seksi Pelayanan Pemakaman;
 3. Seksi Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman.

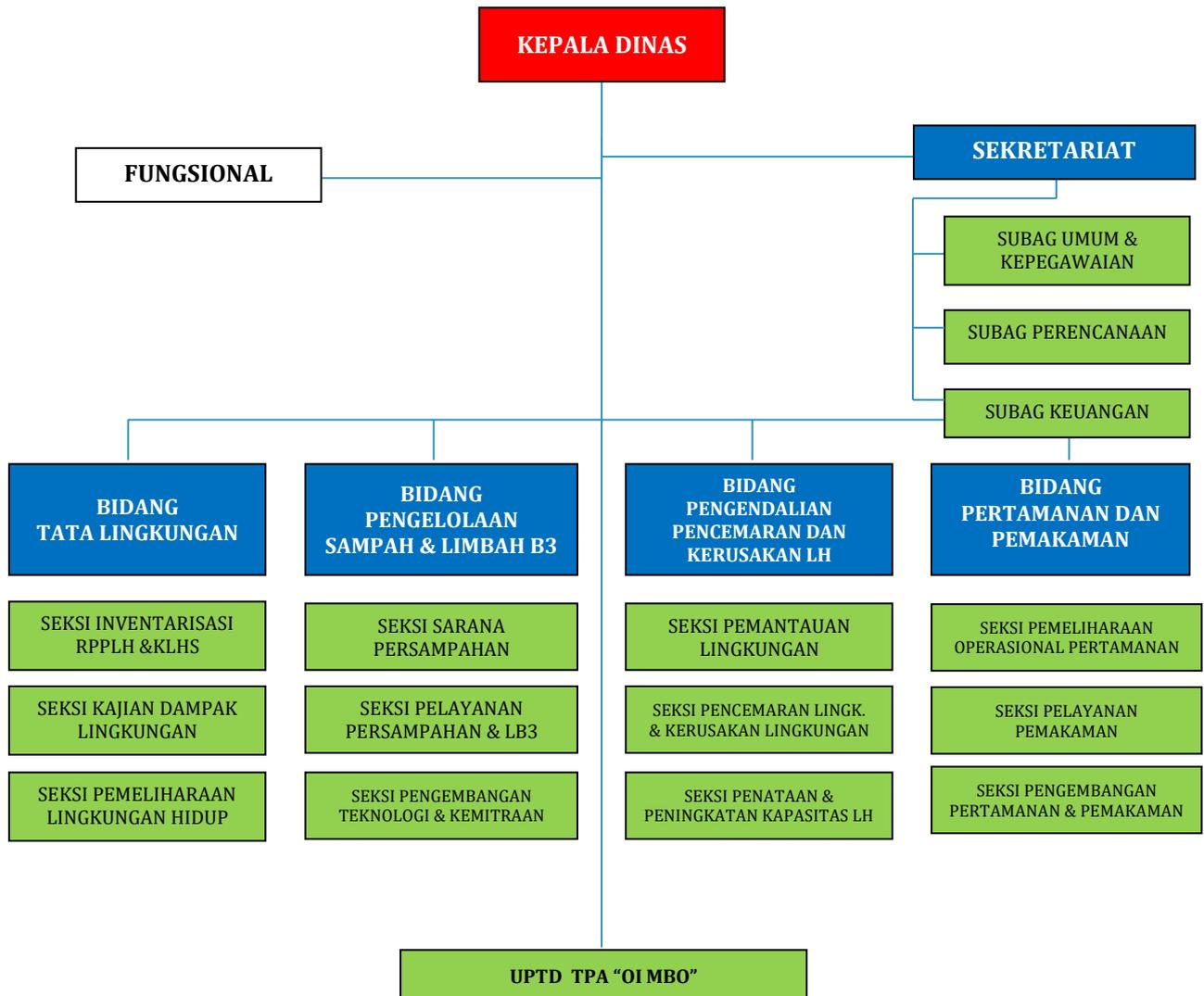
Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional diperlukan untuk menampung personil-personil dengan keahlian khusus antara lain Pejabat Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan dan Pejabat Pengawas Lingkungan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Kepala Dinas Melaksanakan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;

- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Sumber Daya OPD

1. Kepegawaian

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima memiliki 137 orang pegawai (PNS) dengan rincian 127 orang pegawai laki-laki dan 10 orang pegawai perempuan. Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berpangkat mulai dari yang tertinggi Pembina Utama Muda (Golongan IV/c) dan terendah Juru Muda Tk. I (Golongan I/b), dan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai DLH Kota Bima berpendidikan terakhir tertinggi S2 dan terendah SD/Paket A.

Tabel 1.1.
Jumlah pegawai DLH Kota Bima
Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan/Ruang

NO	KEPANGKATAN GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PERSONIL
	Pembina Utama Muda – IV/c	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I – IV/b	1 Orang
3.	Pembina – IV/a	7 Orang
4.	Penata Tingkat I – III/d	16 Orang
5.	Penata – III/c	6 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I – III/b	12 Orang
7.	Penata Muda – III/a	7 Orang
8.	Pengatur Tingkat I – II/d	23 Orang
9.	Pengatur – II/c	14 Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I – II/b	15 Orang
11.	Pengatur Muda – II/a	6 Orang
12.	Juru Tingkat I – I/d	20 orang
13.	Juru – I/c	2 Orang
14.	Juru Muda Tingkat I – I/b	3 Orang
	Jumlah	137 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

Adapun jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Jumlah pegawai DLH Kota Bima
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Pendidikan Pasca Sarjana (S-2)	6 Orang
2.	Pendidikan Sarjana (S-1)	42 Orang
3.	Pendidikan Sarjana Muda (D-3)	0 Orang

4.	Pendidikan SLTA/Paket C	49 Orang
5.	Pendidikan SLTP/Paket B	18 Orang
6.	Pendidikan SD/Paket A	17 Orang
	Jumlah	132 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan struktural rata-rata memiliki pendidikan S-1 sampai S-2. Adapun jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural (eceloning) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, tergambar sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Kondisi Pegawai DLH Kota Bima
Berdasarkan Jabatan Struktural, Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	JABATAN STRUKTURAL	GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN					
		IV	II I	II	I	Non Gol.	S D	S M P	S M A	D - 3	S 1	S 2
1.	Ecelon II	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	Ecelon III	4	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1
3.	Ecelon IV	4	13	0	0	0	0	0	0	0	13	4
4.	Staf	0	26	58	25	0	17	18	49	0	25	0
5.	Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	9	40	58	25	0	17	18	49	0	42	6

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

2. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima belum memiliki gedung kantor sendiri, untuk sementara masih menempati Gedung Workshop Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang terletak di Jalan Dam Rontu Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima.

b. Peralatan Kantor

Peralatan mebeleur yang di miliki DLH Kota Bima belum cukup memadai untuk menunjang pelayanan dan operasional, DLH Kota Bima masih membutuhkan tambahan meubeleur seperti kursi dan meja kerja, lemari arsip dan lemari untuk menyimpan barang aset lainnya yang masih dipergunakan. Jumlah komputer sebanyak 3 unit, jumlah laptop sebanyak 10 unit (2 Unit rusak berat dan 8 unit dalam kondisi masih bisa dipergunakan dengan baik), jumlah LCD sebanyak 1 unit dalam kondisi baik, dan jumlah AC sebanyak 5 unit dalam kondisi baik.

c. Kendaraan

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima memiliki 34 unit kendaraan roda enam yang terdiri dari 24 unit dump truck, 5 unit ambroll, 3 unit mobil tangki air, 1 unit mobil kompaktor (rusak berat) dan 1 unit mobil sedot lumpur (rusak berat). Kemudian terdapat 8 Unit kendaraan roda 4 yang terdiri dari 1 unit mini bus, 1 unit mobil Laboratorium dan 6 unit pick up (1 unit dalam kondisi rusak berat). Selanjutnya terdapat 20 unit motor 3 Roda serta 9 unit kendaraan roda dua (sepeda motor). Dan juga terdapat 3 unit alat berat berupa 2 unit excavator dan 1 unit mini loader. Jenis dan jumlah kendaraan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tersaji dalam table tersebut di bawah ini :

Tabel. 1. 4.
Jumlah Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup 2021

N O	JENIS SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KET
A	Kendaraan Operasional		
1	Dump Truk	24 Unit	1 Pinjam Pakai ke UPT Pasar
2	Ambrol Truck	5 Unit	
3	Mobil Tanki Air	3 Unit	
4	Mobil Pick Up	4 Unit	1 Rusak
5	Mobil Penyedot Lumpur	1 Unit	Rusak
6	Mobil Compactor	1 Unit	Rusak
7	Mobil Laboratorium	1 Unit	
8	Excavator	2 Unit	
9	Mini Lodge	1 Unit	
10	Sedan Minibus	1 Unit	
11	Motor Roda 3	20 Unit	
12	Motor Roda 2	9 Unit	
B	Peralatan		
1	Mesin Pemotong Rumput Gendong	12 Unit	
2	Mesin Pemotong Rumput Dorong	3 Unit	
3	Gergaji Mesin	1 Unit	Rusak
4	Container	42 Buah	4 Rusak Berat

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima masih membutuhkan jumlah kendaraan yang cukup dan layak jalan untuk melakukan kegiatan operasional lainnya seperti untuk pengangkutan sampah, pemantauan kualitas lingkungan, koordinasi ke kecamatan dan kelurahan, pengawasan lingkungan maupun pembinaan ke kecamatan/kelurahan.

1.5. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Secara administrasi, Kota Bima berada di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"- 118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"- 8°30'00" Lintang Selatan. Tingkat curah hujan rata-rata 132, 58 mm dengan Hari hujan rata-rata 10.08 hari/bulan. Sementara matahari bersinar terik dengan rata-rata intensitas penyinaran rata-rata 21° C sampai 38°C. Hal ini menyebabkan Kota Bima ditetapkan kota terpanas di Indonesia pada tahun 2014. Karena luasan Kota Bima terbatas akan berakibat menahan pertumbuhan tidak berimbang dan penggunaan lahan yang tidak beraturan. Wilayah timur relatif belum berimbang dengan wilayah barat, karena penduduk umumnya masih di pusat kota. Luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan permukiman baru di Kota Bima semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang terbuka hijau. Suhu udara umumnya meningkat dan kualitasnya menurun.

Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air menurun/sedikit. Namun karena desakan kebutuhan, pada lokasi-lokasi tersebut tetap dibangun permukiman. Pertumbuhan permukiman dan menurunnya luasan daerah terbuka yang tidak didukung drainase sering menyebabkan banjir atau genangan di berbagai wilayah. Banjir atau genangan ini bahkan terjadi daerah-daerah utama dan merusak berbagai sarana jalan. Sungai yang ada di Kota Bima juga banyak yang tercemar, dengan indikator belum memenuhi baku mutu parameter COD dan BOD serta menjadi pembuangan sampah. Permasalahan fisik alam yang penting untuk diperhatikan juga adalah Kota Bima termasuk daerah rawan bencana alam. Dampak regional adalah penurunan kualitas lingkungan regional akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya berdampak pada kondisi Kota Bima seperti kondisi sungai, lahan kritis, air, udara dan tanah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018 – 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan daerah.

Dari Visi tersebut di atas, dinas lingkungan hidup mengacu pada misi yang ke 4 yaitu Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana. Selanjutnya dari misi tersebut kemudian di elaborasi dalam tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berikut tujuan, sasaran, indicator dan target kinerja 5 (lima) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sesuai dengan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Kinerja pada Periode (2018)	Target Kinerja tujuan/ Sasaran pada Tahun ke				
							2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	85%	Meningkatnya Kualitas Air & Udara	Indeks Kualitas	50	50	50	50	50	50
					Indeks Kualitas Udara	78,92	79	79,5	80	82	85
				Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	% Luas RTH Publik	11,01	11,01	11,01	11,01	11,34	11,64
					% luas kawasan Direhabilitas	0,4	0,8	2	2,2	2,5	2,5

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan secara komperensif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Penyusunan strategi tersebut didasarkan dengan kondisi internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan, sedangkan dari sisi eksternal terkait peluang dan tantangan. Tabel berikut di bawah ini merupakan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Tabel 2.2
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah sarpras dan SDM pengelolaan sampah - Merangsang pertumbuhan Bank Sampah dalam rangka pengurangan sampah - Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan LH	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengawasan terhadap industry/usaha yang merusak lingkungan - Peningkatan pengawasan Kualitas Air dan Udara
		Meningkatkan kualitas informasi SDA dan LH	
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	Meningkatkan area pemakaman yang tertata	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan pemakaman umum - Peningkatan fasilitas pendukung di dalam kawasan makam - Efisiensi dan efektivitas pemeliharaan taman - Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara Ruang Terbuka Hijau
		Meningkatkan taman yang tertata	
		Meningkatkan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kelompok masyarakat pelindung mata air - Rehabilitasi lahan kritis - Peningkatan peran serta masyarakat dalam adaptasi perubahan

2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima pada awal tahun 2021 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja utama dengan anggaran Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 14 (Empat Belas) program dan 43 (Empat Puluh Tiga)

kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 18.109.905.889,00- (Delapan Belas miliar Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Ratus Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Tabel 2.3

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA BIMA TAHUN 2021**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	50
		Indeks Kualitas Udara	80
2	Meningkatnya Kualitas tutupan Vegetasi	Persentase Luas RTH Publik	11,01
		Persentase Luas Kawasan Direhabilitasi	2,2

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja pada tabel 2.3 tersebut di atas, maka didukung oleh Program dan Anggaran pada table 2.4 tersebut di bawah ini :

Tabel 2.4. Program dan Rencana Anggaran tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	202.554.350
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.437.396.415
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.184.669
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.273.700
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.347.550
6	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	124.598.150
7	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup K Hidup Kota	107.142.900
8	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	19.497.000
9	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	31.849.500
10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota	3.779.864.855
11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	24.156.000

12	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	12.050.600
13	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota	33.405.000
14	Pengelolaan Sampah	3.262.585.200
	JUMLAH	18.109.905.889,00

Dari gambaran table 2.4 tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima akan melaksanakan 14 (Empat Belas) program dengan total anggaran sebesar Rp. 18.109.905.889,00 (Delapan Belas miliar Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Ratus Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selaku pengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Cara Reviue atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bima. Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2021 digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indicator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2021.

3.1 . Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Capaian kinerja Organisasi diukur dari setiap Capaian Kinerja Tujuan, sasaran, Program dan kegiatan. Pengukuran capaian

kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu :

- A. Membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2021 dengan mengacu kepada :
 - 1. Pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2021;
 - 2. Pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2021;
 - 3. Pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2021.
- B. Membandingkan Capaian Kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 dengan berdasarkan pada :
 - 1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2020 dan tahun 2021
 - 2. Pencapaian target program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2020 dan 2021;
 - 3. Pencapaian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2020 dan 2021
- C. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Jangka Penengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Pembahasan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagaimana tersebut di atas dapat di uraikan berikut ini:

A. Membandingkan antara Target dan Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2021

1. Pencapaian Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2021

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Target dan capaian dari tujuan dimaksud dijelaskan dalam table tersebut di bawah ini:

Tabel 3.1. Pencapaian Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	79	52,73	66,75%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2021 berada pada angka 52,73 dari yang ditargetkan 79 atau capaian kinerja 66,75%, atau tidak memenuhi target. Pencapaian indikator tujuan pada Dinas Lingkungan Hidup tidak memenuhi target, di sebabkan menurunnya indikator sasaran pada indeks kualitas Air dan tutupan Hutan. Nilai ini menunjukkan kategori Sangat kurang, seperti table 3.2 tersebut di bawah ini :

Tabel 3.2 Kategori IKLH

Kategori IKLH	Nilai
Unggul	$x > 90$
Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
Baik	$74 < x \leq 82$
Cukup	$66 \leq x \leq 74$
Kurang	$58 \leq x < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
Waspada	$x < 50$

2. Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2021, dijabarkan dengan Sasaran Strategis berupa Meningkatnya Kualitas Air dan Udara dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara

Sasaran strategis selanjutnya adalah Meningkatkan Kualitas Tutupan Vegetasi, dengan 2 indikator yaitu;

1. Persentase Luas RTH Publik.
2. Persentase Luas Kawasan direhabilitasi.

Untuk melihat sejauh mana capaian dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator sasaran yang disebutkan di atas dapat dilihat pada table 3.3 tersebut di bawah ini :

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	50	24,55	49,10
		Indeks Kualitas Udara	80	85,35	107
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	Persentase Luas RTH Publik	11,01	11,21	10,80
		Persentase Luas Kawasan direhabilitasi	2,2	0,92	41,82

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian dari 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran, hanya satu indikator sasaran yang menunjukkan hasil yang memenuhi target yaitu indeks kualitas udara dengan capaian kinerja 107%, sementara 3 (tiga) indikator sasaran tidak mencapai target, yaitu indikator sasaran indeks kualitas air, persentase luas RTH Publik dan persentase luas Kawasan direhabilitasi. Indikator sasaran pada Indeks kualitas air capaian kinerja 49,10 dan persentase kawasan direhabilitasi hanya mampu capaian kinerja 41,82%, sementara persentase luas RTH publik capaian kinerja 101,80%. Indeks Kualitas Air yang ditargetkan mutu 50, hanya capaian 24,55 atau cemar sedang, dan pada Persentase luas kawasan direhabilitasi yang ditargetkan 2,2%, hanya mampu direalisasikan sebesar 0,92% atau 41,82%. Pencapaian target ini dipengaruhi oleh minimnya anggaran rehabilitasi yang di targetkan 27,46 Ha, hanya

tersedia anggaran 2,5 Ha, disamping itu kecilnya tingkat keberhasilan pada kegiatan penanaman pada daerah sekitar mata air yang kurang maksimal, hal ini terjadi banyaknya lahan di sekitar mata air mengalami kerusakan akibat pembakaran lahan, disamping itu juga kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hutan sangat minim.

3. Pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2021

Dalam Mewujudkan pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan dinas lingkungan hidup kota Bima, pada tahun 2021, didukung oleh 10 (sepuluh) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Pencapaian Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian Kinerja
I	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokume Prerencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan. RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,00
II	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%
1	Penyediaan Gaji dan	jumlah ASN			99,00

2	Tunjangan ASN	mendapatkan penatausahaan	1 tahun	1 tahun		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	cakupan pelaksanaan	100 persen	99 persen	99,99	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	4 laporan	4 laporan
III	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 tahun	1 tahun		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	100%	
	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	100%
		3	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	4 laporan	4 laporan
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SSPD	1 tahun	1 tahun	76,13
IV	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim	1.000 lembar	980	98%	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 BULAN	100
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan kantor	1 kegiatan	1 kegiatan
V	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	50 kendaraan	48 kendaraan	96%	

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	cakupan layanan perpajakan kendaraan Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya	50 kendaraan 50 kendaraan	38 kendaraan 35 kendaraan	76% 70%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah gedung, kantor yang terpelihara	1 Bangunan	1 Bangunan	100,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	50 kendaraan	50 kendaraan	69,42
VI	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Menurunnya Pelanggaran Terhadap RPPLH	75%	75%	100%
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Jmlah Dokumen RPPLH Tata Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Jumlah dokumen RPPLH	2 dokumen	2 dokumen	100%
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Jml Dokumen KLHS disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH)	Jumlah Dokumen (DIKPLH) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
VII	PROGRAM Pengendalian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup K Hidup Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	50/80	24,55/85,35	49,10
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup K Hidup Kota	Nilai Kualitas Air dan Udara	50/80	24,55/85,35	49,10
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,	jumlah kordinasi titik pencenaran	10 titik	11 titik	110%

	dan Laut				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelurahan Kampung iklim	3 Kelurahan	2 kelurahan	67%
VIII	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	Nilai Kualitas Air dan Udara	50/80	24,55/85,35	49,10
1	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Bentuk Media (sarana) Penyampaian Informasi	3 Lokasi	3 Lokasi	100,00
IX	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	Nilai Kualitas Air dan Udara	50/80	24,55/85,35	49,10
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	Jumlah Pantai yang dibersihkan	3 kali	3 kali	100%
X	PROGRAM Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Persentase Luas RTH Publik	11,01%	11,21%	101,80%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Luas Tutupan Vegetasi	4,480,40	1,129,50	25%
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen rencana penetapan pengelolaan kehati	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola	20 taman	20 taman	100%
3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Publik Yang ditangani	23 makam	21 makan	91%
XI	PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi	55%	48%	87%

	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah	Jumlah Izin Lingkungan yang Patuh	55%	48%	87%
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan	500 izin	335	67%
XII	PROGRAM Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Kota	Persentase Meningkatkan Jumlah Ormas Sadar Lingkungan	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Kab/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	1 Kali	1 kali	100%
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah Pokmas Peduli Lingkungan	3 kelompok	3 kelompok	100%
XIII	PROGRAM Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota	Persentase meningkatnya penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100%		100%
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pokmas/lembaga yang dinilai	3 lembaga	3 lembaga	100%
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Lahan yang direhabilitasi	3 ha	2,5 ha	83,33%
XIV	PROGRAM Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang tertangani	67%	66,49	99,23%
	Pengelolaan Sampah	- Volume Sampah Yang	72%	72,06	100,8%

		tertangani. - Volume Sampah yang dikurangi	15%	7,61%	50,7%
1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	volume sampah yang terangkut ke TPA	- 228 M2	261,18	114%
2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pokmas pengelola sampah	3 kelompok	2 kelompok	67%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Koordinasi	10 kali	10 kali	100%

Dari Pencapaian program dan kegiatan diatas, dapat dilihat pagu anggaran dengan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021

No	Program/Kegiatan	ANGGARAN		% Capaian Kinerja
		PAGU	REALISASI	
I	Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	124.598.150,00	122.325.000,00	
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	124.598.150,00	122.325.000,00	98,18
II	PROGRAM Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup K Hidup Kota	107.142.900,00	77.138.820,00	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	55.874.600,00	26.066.120,00	46,65

2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	51.268.300,00	51.072.700,00	99,62
III	PROGRAM Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	19.497.000,00	19.497.000,00	
1	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	19.497.000,00	19.497.000,00	100,00
IV	PROGRAM Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	31.849.500,00	27.669.500,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	31.849.500,00	27.669.500,00	86,88
V	PROGRAM Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota	3.779.864.855,00	3.604.740.450,00	
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	13.260.000,00	7.860.000,00	59,28
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	23.236.250,00	20.000.000,00	86,07
3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.743.368.605,00	3.576.880.450,00	95,55
VI	PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	24.156.000,00	23.876.000,00	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.156.000,00	23.876.000,00	98,84

VII	PROGRAM Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	12.050.600,00	11.295.000,00	
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	12.050.600,00	11.295.000,00	93,73
VIII	PROGRAM Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota	33.405.000,00	19.725.000,00	
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	33.405.000,00	19.725.000,00	59,05
IX	PROGRAM Pengelolaan Sampah	3.262.585.200,00	3.160.022.350,00	
1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.175.671.500,00	3.121.942.350,00	98,31
2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	63.823.700,00	28.650.000,00	44,89
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	23.090.000,00	9.430.000,00	40,84
	Jumlah	7.407.199.805,00	7.066.289.120,00	95,37%

B. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021, berdasarkan pada:

1. Pencapaian Kinerja Tujuan 2020 dan 2021

Setelah disajikan capaian kinerja tujuan dan sasaran tersebut di atas, berikut akan disajikan table perbandingan capaian kinerja tujuan dan sasaran antara tahun 2020 dengan tahun 2021 seperti pada table 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2020 dan 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
1	Meinngkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,123	86,19%	52,73	66,75%

Bedasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada penurunan capaian kinerja tujuan dari 86,19% pada tahun 2020 menjadi 66,75% pada tahun 2021 atau dengan angka Capaian kinerja pada tahun 2020 terrealisasi 86,19% dari target 80, sementara pada tahun 2021 angka capaian kinerja terrealisasi 52,73 dengan target 79%. Jika Bandingkan dengan pencapaian kinerja tujuan pada tahun 2020 dengan 2021 terjadi penurunan sebesar 21,39 angka, hal ini disebabkan Indeks Kualitas Air dan indeks kualitas tutupan hutan, dari kedua kinerja sasaran tersebut Maing-masing penurunan yang sangat signifikan, kualitas air dari angka 52,22 pada tahun 2020 turun menjadi dari angka 24,55 pada tahun 2021, sementara Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2020 pada angka 85,13 menjadi 40,84 pada tahun 2021. Penurunan indeks kualitas tutupan hutan tersebut di sebabkan karena meningkatnya kerusakan hutan dan lahan dari tahun ke tahun terus terjadi, hal ini sulit bagi pemerintah daerah untuk menjaga, melindungi dan monitoring, karena beralihnya kewenangan

pengelolaan hutan dari pemerintah daerah Kab/Kota menjadi kewenangan daerah Provinsi.

2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2020 dan 2021

Dari uraian pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2021 diatas, maka disajikan perbandingan kinerja sasaran tahun 2020 dengan tahun 2021, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7. Perbandingan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2020		2021		
			Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	52,73	104	50	24,55	49,10
		Indeks Kualitas Udara	81,36	102,99	80	85,35	107
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	% Luas RTH Publik	11,01	100	11,01	11,21	101,80
		% Luas Kawasan direhabilitasi	0,8	62,50	2,2	0,92	41,82

Berdasarkan pada tabel diatas pencapaian kinerja sasaran pada indeks kualitas air ada penurunan yang ekstrim, capaian kinerja pada tahun 2020 ke 2021, mengalami penurunan kualitas yang sangat mengkhawatirkan dari angka capaian kinerja 104% turun menjadi angka 49,10, sedangkan pada indeks kualitas udara pencapaian kinerja pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 masih stabil dengan angka capaian kinerja 107%, sementara Luas RTH Publik capaian mengalami kenaikan pada angka 101,82%, sedangkan luas kawasan direhabilitasi mengalami penurunan bahkan mengalami peningkatan lahan kritis. Untuk indeks kualitas air, pada tahun 2020 berada pada indeks Pencemaran 52,17 (cemar ringan) sedangkan pada tahun 2021 dari yang ditargetkan sebesar 50 terealisasi 24,55(cemar sedang)

atau penurunan kualitas air dari tercemar ringan ke cemar sedang, ini terlihat pada tabel di bawah ini:

Berikut disajikan tabel hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara di Kota Bima pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Data Analisa Laboraturium

NO	NAMA SUNGAI	KOORDINAT	SUHU (°C)	pH	BOD	COD	TSS	DO	NO ₃ -N	PHOSPAT	Fecal
1	Sungai Lampe	S-8.513529 E 118.798432	28,2	9	1,74	3	2,5	0,07	5,7	0,15	4600
2	Sungai Oi Mbo	S-8.47260	28,5	8,8	2,25	8,73	1	0,66	9,3	0,32	6300
3	Sungai Rabado	S-8.478928 E 118.76543	27,8	8,7	2,25	15,3	1	0,61	8,86	0,31	16000
4	Sungai Rabasalo	S-8.460677 E 118.756570	28,2	8,2	3,34	6,81	5	0,59	5,32	0,32	16000
5	Sungai Sadia	S-8.470212 E 118.742001	28,4	8,4	2,35	21,8	7	0,46	13,29	0,18	1700000
6	Sungai Bedi	S-8.463849 E 118.737646	28,5	8,4	2,57	33,7	4	0,89	7,09	0,33	2100
7	Sungai Ranggo	S-8.450825 E 118.732461	27,9	8,2	2,02	29,1	4	0,49	9,3	0,4	3500000
8	Sungai Jatibaru	S-8.439913	28,5	8	2,9	3	5	0,4	13,29	0,26	1100000
9	Sungai Jati	S-8.434318 E 118.771267	28,5	8,1	3,43			0,4	8,86	0,2	7000
10	Sungai Melayu	S-8.443245 E 118.723378	28,6	8,2	1,7	51,4	14	0,44	9,75	0,96	16000000
11	Sungai Jembat	S-8.456964 E	28,5	8,4	2,8	29,9	23	0,59	19,15	0,24	

Sumber Dokumen IKLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2021

Tabel 3.9 Hasil perhitungan Ideks Pencemaran Air

Tabel 2 (PERHITUNGAN)				
Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	4	36%	50	18,18
Cemar Sedang		0%	30	0,00
cemar Berat	7	64%	10	6,36
Total	11	100%		24,55

Sumber Dokumen IKLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2021

Sementara kualitas udara Kota Bima sampai saat ini masih relatif bagus dan alami dengan kata lain masih dibawah standar baku mutu serta belum terganggu oleh polusi yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan belum ada industri-industri besar yang menghasilkan emisi dan gas buang yang menjadi sumber polutan. Selama ini emisi terbesar hanya didominasi oleh industri rumah tangga dan perusahaan BUMN, seperti Pertamina dan PLN. Disisi lain pengujian dan tes emisi kendaraan bermotor belum dilakukan mengingat belum adanya perda yang mengatur serta peralatan yang memadai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien dengan Metode Pasive Sampler dengan menempatkan alat pemantau pada 4 (empat) titik perwakilan yaitu, pada daerah transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran dengan 2 (dua) kali sampling yaitu bulan Juni dan bulan Agustus. Saat ini data pengambilan sampling menggunakan titik sampling dan pemantauan kualitas udara ambien, sementara untuk data emisi gas buang belum dilakukan. Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konsisten, komponen yang konsentrasinya selalu bervariasi adalah air dalam bentuk uap H₂O dan CO₂ jumlah uap air yang terdapat di udara bervariasi tergantung dari cuaca dan suhu.

Berikut disajikan table hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara di Kota Bima pada tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 3.10 Formulasi Hasil perhitungan Ideks Pencemaran Air

FORMULASI PERHITUNGAN INDEKS PENCEMARAN UDARA

Tabel 1										
No.	Kota/Kabupaten/Desa	Lokasi Sampling	SO2(µg/Nm3)			NO2(µg/Nm3)			rata Kab/Kota/Provinsi	
			Periode		Rata-Rata	Periode		Rata-Rata	SO2	NO2
			I	II		I	II			
1	Kota Bima	Masjid Sultan Salahudin	6,43	5,93	6,18	14,09	8,71	11,4	9,01125	11,06875
		SMPN 6 Kota Bima	11,01	12,66	11,835	11,21	11,90	11,555		
		Bank Sampah	8,16	8,77	8,465	13,73	12,46	13,095		
		Kantor Walikota	10,14	8,99	9,565	11,06	5,39	8,225		
									9,01125	11,06875

PERHITUNGAN

TABEL 2			
Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index
NO2	11,06875	40	0,276719
SO2	9,01125	20	0,450563
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,363641
Indeks Kualitas Udara			85,3533

Langkah pengisian:

- Input nilai pemantauan NO2 dan SO2 sesuai periode dan lokasi pengambilan ke tabel 1
- Nilai rata-rata NO2 dan SO2 muncul pada cell M21 dan L21
- Nilai rata-rata NO2 dan SO2 otomatis masuk pada tabel di cell CD28 dan CD29
- Nilai Indeks Kualitas Udara akan muncul secara otomatis pada tabel 2 cellG31 dan langsung pindah pada sheet IKLH

Indikator lainnya yang menjadi indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berada pada angka 11,01 tahun 2020, sementara tahun 2021 dengan target sebesar 11,01 dengan capaian sebesar yaitu sebesar 11,21. Pada tahun 2021 ada terjadi peningkatan dari target, sementara Rehabilitasi lahan target 2,2 persen yang terrealisasi 0,92 %. Pencapaian target pada rehabilitasi lahan tidak terpenuhi, karena kendala keterkaitan lahan hak milik pribadi perorangan yang sangat sulit untuk melakukan rehabilitasi lahan, sehingga pencapaian dari target hanya mampu 41,82, persen. Luasan RTH publik di Kota Bima berupa taman, pemakaman, lapangan terbuka dan hutan kota dengan total luasan sebesar 243,54 Ha, sementara luasan kawasan terbangun di Kota Bima seluas 27,29 Ha. Berikut disajikan table tentang luasan RTH Publik di Kota Bima berdasarkan jenis dan luasannya sebagai berikut :

Tabel 3.11. Rekap Luas RTH di Kota Bima Tahun 2021

No	Uraian	Luas (Ha)	Keterangan
1	Taman	22,10	
2	Lapangan Terbuka	6,98	

3	Kuburan	36,61	
4	Hutan Kota		
TOTAL		243,54	

Sumber : Dinas Lingkungan Kota Bima Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah luas RTH sebanyak 243,54 Ha, sementara luas kawasan terbangun adalah sebesar 27,29 Ha. Indikator ke empat dari sasaran Dinas lingkungan Hidup Kota Bima adalah persentase luas kawasan direhabilitasi dari capaian tahun 2020 sebesar 0,5% menjadi 0,92% pada tahun 2021 dari yang ditargetkan sebesar 2,2 %, walaupun ada peningkatan rehabilitasi dari tahun 2020 ke tahun 2021, tapi dalam pencapaian kinerja tidak memenuhi target. Penentuan target capaian tahun 2021 ini berdasarkan luasan lahan yang direhabilitasi pada tahun 2021 yaitu 27,46 Ha dari total luasan lahan kritis di Kota Bima sebesar 1.248 Ha. Sementara luasan lahan yang direhabilitasi hanya mampu terrealisasi pada tahun 2021, 2,5 Ha yang dilakukan dengan penanaman pohon di sekitar mata air, dari 2,5 Ha yang di konservasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima hanya terlihat tumbuh dengan baik seluas kurang lebih 2 Ha, atau 0,1% dari total luas lahan kritis di Kota Bima.

3. Pencapaian Target Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2020 dan Tahun 2021

Berikut akan disajikan perbandingan pencapaian target program tahun 2020 dan 2021, dengan Realisasi capaian kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020 dan 2021 seperti tersebut di bawah ini:

Tabel 3.12 Pencapaian target program dan kegiatan DLH Kota Bima tahun 2020 dan tahun 2021.

No	2020	2021	Indikator	Kinerja			% Capaian Kinerja
	Program/Kegiatan	Program/Kegiatan		Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	
I	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Menurunnya	Tidak Ada	75%	75%	100%

	Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup		Pelanggaran Terhadap RPPLH				
II	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	PROGRAM Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	104%	50/80	24,55/85,35	49,10/107%
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			80%			
V	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN	PROGRAM Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota	Persentase Luas RTH Publik	70,96%	11,01	11,21	101,82%
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			23%			
VI		PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi		55%	48%	87,27%
VII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	PROGRAM Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	Persentase Meningkatnya Jumlah Ormas Sadar Lingkungan	20%	100%	67%	67%
VII I		PROGRAM Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota	Persentase Meningkatnya Jumlah penghargaan di bidabg lingkungan hidup		100	67%	67%
IX	Program Pengembangan Kinerja	PROGRAM Pengelolaan	Persentase Sampah yang tertangani	64,5%	67%	66,49	99,23%

	Pengelolaan Persampahan	Sampah	Volume Sampah Yang tertangani.	72%	72%	72,06	100,8%
			Persentase Volumen Sampah yang dikurangi	6,9%	15%	7,61	50,7%

a. Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2020 dan Tahun 2021

Berikut tersaji table tentang realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 pada masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.13. Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2020 dan 2021

No	Program/Kegiatan 2020	Program/Kegiatan 2021	ANGGARAN		
			REALISASI 2020	TARGET	REALISASI 2021
VI	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	108.535.000	124.598.150,00	122.325.000,00
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	PROGRAM Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup K Hidup Kota	175.299.729	107.142.900,00	77.138.820,00
VIII	Progran Peningkatan Pengendalian Polusi	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	175.299.150	19.497.000,00	19.497.000,00
IX		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota		31.849.500,00	27.669.500,00

X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANA	PROGRAM Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kota	4.153.751.900	3.779.864.855,00	3.604.740.450,00
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman				
XI	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	545.326.5000	24.156.000,00	23.876.000,00
XII		PROGRAM Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	52.935.000	12.050.600,00	11.295.000,00
XIII		PROGRAM Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota		33.405.000,00	19.725.000,00
XIV	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	PROGRAM Pengelolaan Sampah	3.309.449.150	3.262.585.200,00	3.160.022.350,00

C. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Kinerja Sasaran jangka menengah yang direncanakan

Pencapaian indikator kinerja tahun 2021 dengan target kinerja sasaran jangka menengah daerah yang ditetapkan pada RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023. Mengacu kepada misi ke 4 RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur

pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana.

Untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja sasaran tahun berjalan (tahun 2021) terhadap target Rencana Strategis pada tahun 2021 sebagaimana table tersebut di bawah ini :

Tabel 3.14 Pencapaian indikator kinerja sasaran tahun berjalan terhadap target RPJMD tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pada Awal RPJMD	Targe t RPJMD	Realisasi Kinerja	Realisasi RPJMD S/d	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	50	50	24,55	38,28	50
		Indeks Kualitas Udara	78,92	80	85,35	85,35	86
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	% Luas RTH Publik	11,01	11.31	11,21	11,21	13
		% Kawasan Direhabilitasi	0,4	2,2	0,92	0,92	25

3.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Berdasarkan uraian dan diskripsi terhadap beberapa hal tersebut di atas, maka dapat diuraikan analisis tentang penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja disertai dengan alternative solusi yang telah dan akan dilakukan.

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, hanya satu indikator sasaran yang mencapai target dan tiga indikator tidak memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2021, yaitu Indikator sasaran berupa

Indeks Kualitas air dengan capaian target sebesar 24,55 dari yang ditargetkan 50 atau capaian kinerja hanya 49,10 persen, terjadi peningkatan pencemaran air dari 52,73 cemar ringan menjadi 24,55 cemar sedang, oleh karena itu perlu dilakukan lebih intensif dalam berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas air (air sungai maupun air laut), Program pengendalian lingkungan. Adapaun program dan kegiatan perlu di intensif antara lain:

- a. Adanya kegiatan kali bersih dan bersih pantai.yang perlu perhatian khusus;
- b. Dilakukan penanaman gerakan bersih sungai dan pantai yang dilaksanakan secara terus-menerus.
- c. Perlu diperkuat kelompok Komunitas sungai.
- d. Perlu diaktifkan kelompok-kelompok menjaga mata air

Selanjutnya untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Udara dari target 80 dapat dicapai nilai indeks 85,35 atau 107%. Hal ini disebabkan oleh intensitas pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan asap (emisi), berkurangnya masyarakat yang membakar sampah sembarangan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah untuk indikator sasaran persentase luas RTH Publik didapatkan nilai capaian sebesar 101,80% lebih dari target. Hal ini tingkatan pembangunan pada lahan baru, walaupun pelaksanaan pembangunan taman pada lahan baru diluar lahan yang sudah ditentukan sebagai RTH ada penambahan 2% tapi belum cukup. Sedangkan untuk indicator sasaran persentase luas lahan dikonservasi tidak memenuhi target dengan terealisasi sebesar 0,92% atau 46%%. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan pelaksanaan kegiatan konservasi di lahan kritis. Selama ini penanaman dimaksud dilakukan pada lahan-lahan milik masyarakat sehingga ketika pemilik lahan punya kepentingan lain di dalam lahan tersebut juga akan mengganggu keberadaan pohon yang ditanam tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan insentif kepada pemilik lahan atas penanaman dan pemeliharaan untuk pohon yang ditanam tersebut,

dan ternyata upaya yang telah dilakukan tersebut masih jauh dari harapan dan ke depan pemerintah daerah harus mampu menguasai lahan yang akan dijadikan target lokasi penanaman dengan sebelumnya melakukan kajian terhadap kelayakan dari lahan tujuan.

Selain dari beberapa faktor pendukung dan penghambat tersebut di atas, juga disajikan beberapa permasalahan lainnya berikut solusinya sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Tidak teralisasinya pengadaan sarana dan prasarana (mobil pengangkut sampah) sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target.
2. Belum beroperasinya bank sampah secara maksimal
3. Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
4. Belum adanya profil yang menggambarkan secara utuh tentang luas RTH dan kawasan pemukiman.
5. Konsentrasi program dan kegiatan hanya pada revitalisasi taman, makam dan hutan kota yang sudah ada.
6. Adanya tumpang tindih dalam implementasi tugas pokok dan fungsi seperti, pembangunan taman baru dilaksanakan oleh OPD lain.

Solusi yang telah dan akan dilakukan :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada
2. Mendukung biaya operasional bank sampah sehingga bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.
3. Terwujudnya penyusunan perwali sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah Kota Bima tentang Pengelolaan Persampahan untuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

4. Menyusun profil Dinas Lingkungan Hidup yang menggambarkan secara detail tentang potensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
5. Menyusun Perda tentang Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH) berikut turunannya.
6. Menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Penambahan luasan RTH public menjadi minimal 20% dari luas Kawasan terbangun sesuai dengan amanat Perda RTRW Kota Bima.

3.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tipe A yang terdiri dari 1 sekretariat dan 4 (empat) bidang. Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah seperti pada table tersebut di bawah ini :

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	49,10	99,77	(50,64)	Inefisien
		Indeks Kualitas Udara	107%	99,67	3,67	Efisien
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	% Luas RTH Publik	101,80	99,75	2,07	Inefisien
		% Luas Kawasan Direhabilitasi	41,82,00	99,76	(53,76)	Inefien

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ada dua indikator sasaran terlihat adanya kurang efisiensi anggaran, yaitu pada indikator sasaran pada indeks kualitas air, dan persentase luas Kawasan direhabilitasi, Dari kedua indikator tersebut inefisiensi dalam penggunaan anggaran, begitu juga capaian kinerja dari tahun sebelumnya sangat menurun ini disebabkan terjadi peningkatan lahan kritis diakibatkan peningkatan alih fungsi lahan, Sementara untuk indikator indeks kualitas udara terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran.

3.4 Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian target tujuan dan target sasaran tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, seperti berikut di bawah ini :

A. Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara diwujudkan dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indeks Kualitas Air

Dalam rangka mewujudkan Indeks Kualitas Air yang baik, didukung oleh dua Program yaitu :

a. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan.

Program pengelolaan sampah memiliki 2 (dua) indikator yaitu persentase sampah yang tertangani dan persentase pengurangan sampah. Nilai capaian pada tahun 2021 ini adalah sebesar 66,49% dari yang ditargetkan sebesar 67,% atau capaiannya 99,24%. Nilai ini didapatkan dari rumusan jumlah sampah yang ditangani (angkut dan buang) dibagi dengan jumlah timbulan sampah dikalikan 100. Berdasarkan data pada neraca sampah bahwa jumlah timbulan sampah secara keseluruhan di Kota Bima adalah sebesar 652,95 M³ dengan berat jenis sampah sebesar 0,33. Dari formula perhitungan tersebut di atas, maka didapatkan jumlah sampah yang ditangani adalah sebesar

470,50 M dari total timbulan sampah sebesar 652,95 dengan kata lain persentase sampah yang terangkut adalah sebesar 72,06 % (neraca sampah terlampir). Selanjutnya, untuk indikator persentase pengurangan sampah adalah jumlah sampah yang dikurangi dibagi dengan total timbulan sampah dikalikan dengan 100. Pada tahun 2021 untuk pengurangan sampah ditargetkan sebesar 20%, namun capaiannya berada pada angka 7,61 atau 38%. Tidak terlepas dari 2 (dua) indikator tersebut di atas, juga didukung oleh 3 (tiga) kegiatan masing-masing tersebut di bawah ini berikut indikator dan capaian pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemroses ahir sampah di TPA/TPST dengan indikator volume sampah yang terangkut dan tertangani. Sesuai dengan neraca sampah terlampir di dapatkan volume sampah 652,95 M³ dan terangkut 470,50 (data jumlah ritase terlampir).
2. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana sarana pengelolaan persampahan dengan indikator jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan berfungsi. Pada tahun 2021 ditargetkan 24 unit dump truck, 5 unit ambroll, 2 unit pick up, 2 unit excavator dan 1 unit mini loader, dan target itu terealisasi pada APBD tahun 2020 dengan pengadaan 5 unit dump truck (2 unit dari DAK dan 3 unit dari DAU) serta pengadaan 2 unit pick up. Dengan demikian realisasi dari target capaian ini adalah sebesar 100%.
3. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan indikator jumlah kelompok bank sampah yang dibina dengan target 3 kelompok bank sampah dan terealisasi 67% atau sebanyak 2 kelompok

bank sampah. Data jumlah dan nama bank sampah terlampir.

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program pengendalian dan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini memiliki indikator persentase meningkatnya kualitas air Pada tahun 2021 kualitas air berada pada cemar sedang pada parameter 10- 30, dengan capaian pada tahun 2021 adalah 24,55 dari target 50. Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan masing-masing sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakam lingkungan hidup pada masyarakat, dengan indikator dari yang ditargetkan sebesar 5 lokasi dan terealisasi sebesar 5 lokasi juga atau 100%.
2. Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dengan indicator jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi dari target 20 usaha/kegiatan hanya mampu direalisasikan sebanyak 11 usaha/kegiatan atau capaian sebesar 60 %.
3. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran target 2 kelurahan, direalisasikan 2 kelurahan meter atau 100 % dengan bendungan rontu, jembatan Ranggo dan sungai padolo.

2. Indeks Kualitas Udara

Indikator Indeks Kualitas air didukung oleh program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indicator meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan didukung oleh kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan dengan indicator nilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

Idealnya untuk mengukur kinerja dari program dan kegiatan ini adalah adanya peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Sampai tahun 2021 ini Pemerintah Kota Bima belum memiliki perda RPPLH dimaksud, sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengukuran atas program dan kegiatan ini.

B. Sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas tutupan lahan memiliki (dua) indikator sasaran yaitu :

1. Indikator Persentase Luas RTH Publik

Dalam rangka mewujudkan capaian dari indikator persentase luas RTH public ini didukung oleh oleh satu Program dan 3 (tiga) sub Kegiatan masing-masing sebagai berikut :

a. Kegiatan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dengan indikator jumlah dokumen rencana penetapan dan pengelolaan keanekaragaman hayati;

b. Kegiatan pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan. Pengelolaan taman dengan indikator persentase taman kota yang tertangani dengan formula perhitungan jumlah taman yang tertangani dibagi dengan jumlah seluruh taman dikalikan dengan 100. Pada tahun 2021 ditargetkan 20 taman dengan realisasi sebesar 100% seluruhnya sebanyak 20 taman. Program dimaksud didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan dengan indikator jumlah taman yang dipelihara dengan baik dari target 49 taman dan terealisasi sebesar 84 % atau sebanyak 44 taman.

2. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan dengan indicator luas taman yang dibangun. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan luas taman sebesar 0,9 Ha dari target sebesar 2 Ha atau 45%.
- c. Kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan indicator persentase area pemakaman yang tertata dengan formulasi perhitungan jumlah area pemakaman yang tertata dibagi dengan jumlah area pemakaman seluruhnya dan dikalikan dengan 100. Berdasarkan formula tersebut dapat dihitung bahwa pada tahun 2021 terdapat 17 Pemakaman yang ditata dari total jumlah pemakamn sebanyak 20 pemakaman. Dengan demikian didapatkan angka 82%. Namun dalam menunjang kegiatan tersebut pengelolaan tersebut di atas, didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dengan indicator Panjang pagar kuburan. Pada tahun 2021 ditargetkan penambahan pagar kuburan sepanjang 560 meter namun mampu direalisasikan sepanjang 560 meter atau 100%. Kegiatan ini dititik beratkan pada pembangunan pagar pemakaman.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan indikator persentase taman kota yang tertangani dengan formula perhitungan jumlah taman yang tertangani dibagi dengan jumlah seluruh taman dikalikan dengan 100. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 79,03 % dengan realisasi

sebesar 70,97 % atau sebanyak 44 taman dari jumlah taman seluruhnya sebanyak 62 taman. Program dimaksud didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

2. Indikator Persentase Luas Kawasan Direhabilitasi

Dalam rangka mendukung terwujudnya luasan Kawasan yang direhabilitasi dilaksanakan oleh dua Program indikator program persentase meningkatnya luas lahan yang dikonservasi dengan formulasi perhitungan luas lahan yang dikonservasi tahun berjalan dibagi dengan luas lahan yang dikonservasi tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100. Dari hasil perhitungan dimaksud dari target 3 ha dengan realisasi pelaksanaan sebesar 83%. Atau 2,5 Ha dari targer 3 Ha. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air dengan indicator luas lahan yang direhabilitasi. Pada tahun 2021 ditargetkan luas lahan yang dikonservasi seluas 3 Ha dan hanya mampu terealisasi 2,5 Ha atau 82%.
- b. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan indicator jumlah kelompok perlindungan mata air deangan target 3 kelompok dan mampu direalisasikan 100% atau 3 Kelompok.

3.5 Realisasi Anggaran

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Kinerja Keuangan OPD

No	Program/Kegiatan	ANGGARAN	
		PAGU	REALISASI
I	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.554.350,00	121.379.350,00
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	147.479.400,00	66.304.400,00
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	8.420.000,00	8.420.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.220.000,00	6.220.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.180.000,00	4.180.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.176.000,00	4.176.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000,00	2.160.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.918.950,00	29.918.950,00
II	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.437.396.415,00	9.344.228.391,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.437.396.415,00	9.185.781.391,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.981.000,00	152.971.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.837.000,00	2.837.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.659.000,00	2.639.000,00
III	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.184.669,00	344.734.694,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.240.800,00	8.240.000,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	20.992.500,00	20.250.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	4.600.000,00	4.600.000,00
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.351.369,00	311.644.694,00
IV	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.273.700,00	314.354.299,00
1	Penyediaan Jasa Surat	170.487.500,00	162.144.000,00

2	Menyurat		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.387.200,00	25.413.299,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.399.000,00	126.797.000,00
V	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.347.550,00	176.535.647,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.975.000,00	83.788.618,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.528.000,00	66.222.029,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.180.000,00	12.180.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.664.550,00	14.345.000,00
VI	Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	124.598.150,00	122.325.000,00
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	124.598.150,00	122.325.000,00
VII	PROGRAM Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup K Kota	107.142.900,00	77.138.820,00
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	55.874.600,00	26.066.120,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	51.268.300,00	51.072.700,00
VIII	PROGRAM Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	19.497.000,00	19.497.000,00
1	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	19.497.000,00	19.497.000,00
IX	PROGRAM Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	31.849.500,00	27.669.500,00

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	31.849.500,00	27.669.500,00
X	PROGRAM Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota	3.779.864.855,00	3.604.740.450,00
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	13.260.000,00	7.860.000,00
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	23.236.250,00	20.000.000,00
3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.743.368.605,00	3.576.880.450,00
XI	PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	24.156.000,00	23.876.000,00
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.156.000,00	23.876.000,00
XII	PROGRAM Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	12.050.600,00	11.295.000,00
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	12.050.600,00	11.295.000,00
XIII	PROGRAM Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota	33.405.000,00	19.725.000,00
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	33.405.000,00	19.725.000,00
XIV	PROGRAM Pengelolaan Sampah	3.262.585.200,00	3.160.022.350,00
1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3.175.671.500,00	3.121.942.350,00

2	Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
3	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	63.823.700,00	28.650.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	23.090.000,00	9.430.000,00
	Jumlah	18.109.905.889,00	17.367.521.501,00

BAB IV

PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tertuang dalam kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup kota Bima Tahun 2021.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan standar akuntabilitas yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ini disusun secara periodik, guna menyajikan data dan informasi pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi kepada stakeholder.

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Kinerja pada 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran strategis; Meningkatnya

Kualitas Air dan Udara;

Pada Sasaran Strategis ini, Dinas Lingkungan hidup Kota Bima, pada indicator indeks kualitas air dari target 50 dapat terealisasi sebesar 24,55 (cemar sedang) atau sebesar 49,10 %. Sedangkan untuk indikator indeks kualitas udara dari yang ditargetkan sebesar 80 mampu direalisasikan menjadi 85,35 atau 107% Dengan demikian bahwa kinerja meningkatnya kualitas air kurang baik sedangkan kualitas udara berada pada kondisi yang sangat baik.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis; Meningkatnya kualitas tutupan vegetasi

Pada sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu persentase luas Ruang Terbuka Hijau Publik dengan target kinerja 11,01% dan dapat dicapai sebesar 11,21 atau 101,80 %. Selanjutnya indikator kedua yaitu persentase luas kawasan direhabilitasi dari yang ditargetkan 2,2 % hanya mampu direalisasikan sebesar 0,92% atau 41,82,00 %.

Dengan demikian maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selaras dengan program dan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kinerja (PK), Baik Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program maupun Capaian Kinerja Kegiatan, ada beberapa sasaran dan program yang tidak memenuhi target yang ditetapkan.

4.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2021 dapat dicapai dengan target yang telah ditentukan. Namun pada beberapa indikator belum mampu dilaksanakan secara maksimal karena adanya beberapa hambatan dan kendala antara lain :

1. Tidak tersedianya lahan untuk penambahan luasan RTH Publik sehingga menyebabkan terjadinya stagnansi dari luasan RTH Publik dimaksud. Dalam RTRW Kota Bima tahun 2011-2031 telah ditetapkan bahwa untuk luasan RTH Publik minimal 20 persen dari total luas kawasan terbangun;
2. Pemerintah Kota Bima tidak memiliki lahan untuk penanaman (konservasi), sehingga konservasi lahan kritis dilakukan pada lahan milik masyarakat sehingga ketika pemilik lahan memiliki kepentingan atas lahan tersebut maka pohon yang telah tertanam akan ikut terganggu. Berdasarkan hambatan dan kendala tersebut di atas, bahwa kunci dalam mendukung pencapaian target dimaksud adalah dengan

penyediaan lahan yang representative sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Lampiran-Lampirn :